

Peran Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) Pada Fenomena Kependudukan di Indonesia Melalui 5 Pilar Kependudukan

Achmad Isya Alfassa¹

¹Universitas Islam Indragiri

¹Program Studi Doktor Kependudukan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

e-mail: achmadisya97@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Grand Desain Pembangunan Kependudukan merupakan suatu pedoman yang digunakan untuk membuat suatu kebijakan dan strategi yang digunakan untuk Pembangunan kependudukan nasional dan provinsi maupun kabupaten. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 Tentang Grand Desain Pembangunan Kependudukan, GDPK terdiri dari 5 pilar yang akan menjadi dokumen rujukan untuk pelaksanaan Pembangunan kependudukan yang terpercaya. Grand Desain Pembangunan Kependudukan terdiri dari 5 pilar Pembangunan di bidang kependudukan antara lain Pengelolaan Kuantitas Penduduk, Peningkatan Kualitas Penduduk, Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk, Pembangunan Keluarga Berkualitas, Penataan Data dan Informasi Kependudukan Serta Administrasi kependudukan. Dokumen Grand Desain Pembangunan Kependudukan yang terdiri dari 5 pilar diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kependudukan dan dapat merumuskan suatu arah kebijakan kependudukan yang baik dan berkelanjutan.

Kata kunci: Grand Desain Pembangunan Kependudukan, Kebijakan Kependudukan, Kuantitas Penduduk, Kualitas Penduduk, Administrasi Kependudukan.

Abstract

The Grand Design for Population Development is a guideline used to create policies and strategies used for national, provincial and district population development. In the Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 153 of 2014 concerning the Grand Design of Population Development, GDPK consists of 5 pillars which will become a reference document for the implementation of reliable population development. The Grand Design for Population Development consists of 5 pillars of development in the population sector, including Population Quantity Management, Population Quality Improvement, Population Distribution and Mobility Management, Quality Family Development, Population Data and Information Arrangement and Population Administration. It is hoped that the Grand Design Document for Population Development, which consists of 5 pillars, can serve as a guide for the central government and regional governments to overcome population problems and be able to formulate a good and sustainable population policy direction.

Keywords: Grand Design for Population Development, Population Policy, Population Quantity, Population Quality, Population Administration.

PENDAHULUAN

Pembangunan kependudukan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan sinergi sinkronisasi dan harmonisasi untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan. Dalam hal ini untuk mendukung pembangunan kependudukan terdapat lima aspek yang harus di wujudkan antara lain pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, pengembangan *data base* kependudukan (Administrasi Kependudukan). Dalam peningkatan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah, isu kependudukan dan dinamikannya memiliki peran yang sangat penting hal ini dikarenakan bahwa penduduk memiliki keterikatan yang erat dengan pembangunan baik itu pada sektor infrastruktur, jasa, pertanian, maupun perekonomian.

Jumlah, struktur, persebaran, dan pertumbuhan penduduk mempunyai dampak pada berbagai aspek seperti pada pembangunan sosial, ekonomi, budaya, pangan, energi, lingkungan dan politik. Untuk mendukung lancarnya pembangunan tersebut maka pemerintah berusaha untuk mendukung dengan membuat suatu kebijakan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang dinilai dapat menjadi pedoman pengambilan keputusan kebijakan jangka panjang serta berpotensi menjadi landasan penanganan permasalahan dan persoalan kependudukan yang terencana, sistematis, dan berkesinambungan. Grand Desain Pembangunan Kependudukan dimulai dari tahap persiapan yang memuat tentang kajian akademik, kajian teknis, dan informasi sektoral yang selanjutnya dimatangkan melalui penyusunan konsep yang dimana hasilnya terumuskan dalam dokumen resmi Grand Desain Pembangunan Kependudukan. Grand Desain Pembangunan Kependudukan telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014, dimana dalam Peraturan Presiden tersebut disebutkan 5 (lima) pilar pembangunan dibidang kependudukan yaitu : Pengendalian Kuantitas Penduduk, Peningkatan Kualitas Penduduk, Penataan Persebaran dan Pengarahannya Mobilitas Penduduk, Pembangunan Keluarga Berkualitas, Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan yang harus tersusun secara teori dan konsep serta pengaplikasian untuk menjadi bagian dari Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK).

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman tentang peran dari Grand Desain Pembangunan Kependudukan pada fenomena kependudukan khususnya di Indonesia berdasarkan 5 (lima) pilar kependudukan agar terarah, tepat sasaran, tepat waktu serta sinergis antar sektor dan wilayah untuk menuju pembangunan yang baik dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi empiris dengan mengumpulkan beberapa sumber teori dan referensi yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Pengumpulan data referensi dilakukan dengan cara teknik membaca dan mencatat serta dilakukan suatu analisa narasi deskriptif untuk menjawab tujuan penelitian yang dikaji. Selain itu penelitian ini juga menggunakan analisis statistik deskriptif dengan metode analisis narasi untuk menjelaskan fenomena data yang telah dianalisis dan dapat memberikan penjelasan sesuai dengan keadaan yang terdapat pada hasil data penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Grand Desain Pembangunan Kependudukan

Grand Desain Pembangunan Kependudukan bertujuan untuk memberikan arahan dan pedoman dalam mengatasi permasalahan-permasalahan kependudukan serta sebagai pedoman dalam menentukan suatu pengambilan keputusan pada suatu kebijakan kependudukan. Pemerintah Republik Indonesia telah mengatur pelaksanaan Grand Desain Pembangunan Kependudukan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 Tentang Grand Desain Pembangunan Kependudukan.

Dalam pelaksanaan GDPK terdapat tujuan utama dan tujuan khusus yang merupakan tujuan ini adalah capaian yang diharapkan agar terciptanya kualitas penduduk yang tinggi. Beberapa tujuan pelaksanaan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) :

1. Tujuan Utama

Tujuan utama pelaksanaan GDPK adalah tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa. (Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 Tentang Grand Desain Pembangunan Kependudukan).

2. Tujuan Khusus

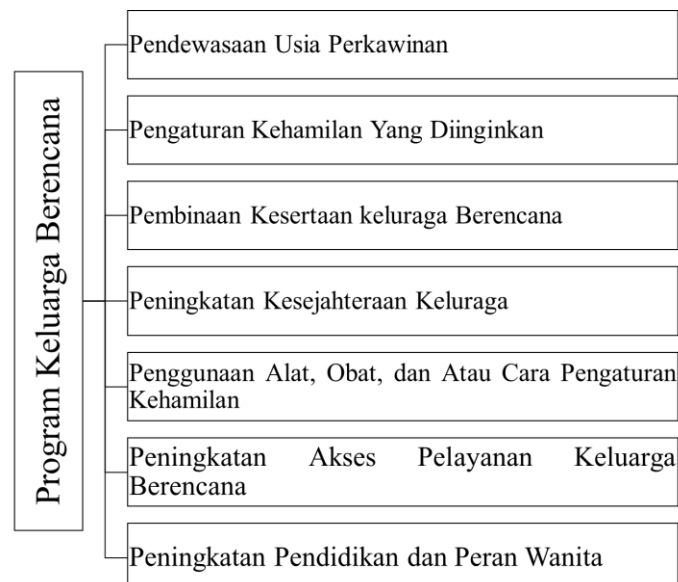
- a. Penduduk tumbuh seimbang.
- b. Manusia Indonesia yang sehat jasmani dan Rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi.
- c. Keluarga Indonesia yang berketahanan, Sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni.
- d. Keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan
- e. Administrasi kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat di percaya

(Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 Tentang Grand Desain Pembangunan Kependudukan)

Dalam pelaksanaan dan realisasi pengendalian kuantitas penduduk serta untuk mencapai penduduk yang tumbuh seimbang, dan keluarga berkualitas, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat melakukan dua kegiatan kependudukan yaitu :

1. Pengaturan Fertilitas (Angka Kelahiran)
2. Penurunan Mortalitas (Angka Kematian)

Dalam pelaksanaan kegiatan pengaturan fertilitas (Angka Kelahiran) pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan fertilitas dapat dilakukan melalui program keluarga berencana yang meliputi antara lain :



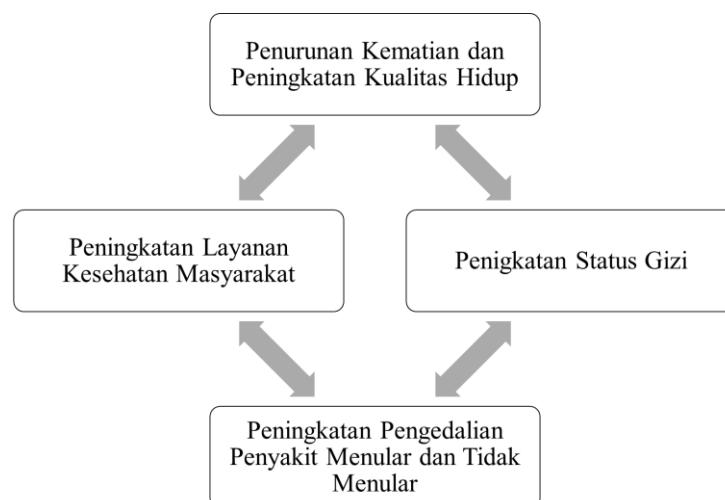
**Gambar 1. Program Keluarga Berencana untuk Pengaturan Fertilitas
(Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 Tentang Grand Desain Pembangunan Kependudukan).**

Program keluarga berencana dilakukan untuk melakukan pengaturan fertilitas, sehingga penerapan pengaturan fertilitas dilaksanakan melalui upaya-upaya pembudayaan norma keluarga kecil, Bahagia, dan Sejahtera. Selain pengatur fertilitas, penurunan mortalitas juga merupakan prioritas utama pemerintah untuk menurunkan mortalitas (Angka Kematian). Penurunan mortalitas dapat ditekan dengan pelaksanaan program sebagai berikut :

Penurunan Mortalitas	1. Penurunan Angka Kematian Ibu Hamil
	2. Penurunan Angka Kematian Ibu Melahirkan
	3. Penurunan Angka Kematian Pasca Melahirkan
	4. Penurunan Angka Kematian Bayi dan Anak

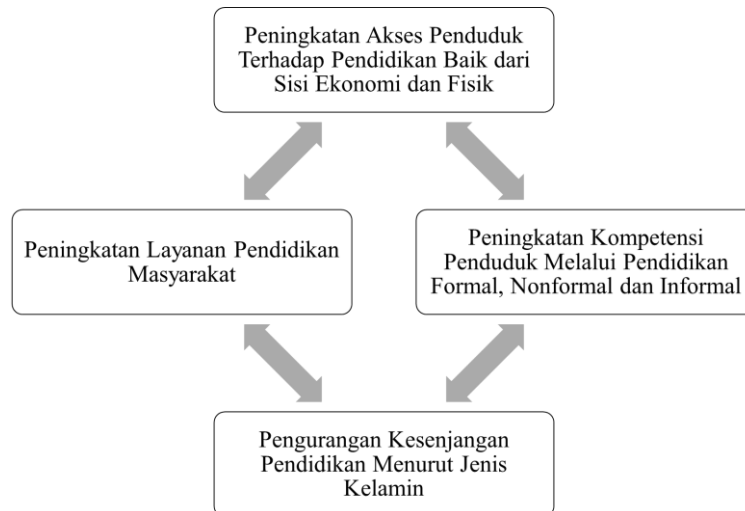
Gambar 2. Tindakan Penurunan Mortalitas (Angka Kematian)
(Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 Tentang Grand Desain Pembangunan Kependudukan).

Selain pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas, Grand Desain Pembangunan Kependudukan juga berusaha untuk meningkatkan kualitas penduduk sebagaimana hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penduduk khususnya di Indonesia. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat melakukan peningkatan kualitas penduduk di bidang kesehatan, pendidikan, agama, ekonomi, dan sosial budaya.



Gambar 3. Peningkatan Kualitas Penduduk di Bidang Kesehatan

Selanjutnya untuk peningkatan kualitas penduduk di bidang pendidikan dapat dilakukan dengan beberapa program, antara lain sebagai berikut :



Gambar 4. Peningkatan Kualitas Penduduk di Bidang Pendidikan

Selain peningkatan kualitas penduduk di bidang kesehatan dan bidang pendidikan, pelaksanaan Grand Desain Pembangunan Kependudukan juga berusaha untuk meningkatkan kualitas kependudukan di bidang ekonomi dengan melakukan beberapa program kegiatan yang berkaitan dengan perekonomian masyarakat. Program yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas penduduk di bidang ekonomi antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan status ekonomi penduduk dengan cara memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran.
2. Pengurangan kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan.

(Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 Tentang Grand Desain Pembangunan Kependudukan).

5 Pilar Pembangunan di Bidang Kependudukan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Desain Pembangunan Kependudukan, terdapat 5 pilar pembangunan di bidang kependudukan antara lain sebagai berikut ini :

1. Pengelolaan Kuantitas Penduduk

Pengelolaan kuantitas penduduk dilaksanakan dengan prinsip pengendalian kuantitas penduduk dengan melaksanakan kebijakan pengaturan fertilitas dan kebijakan penurunan mortalitas. Kebijakan pengaturan fertilitas dilaksanakan melalui upaya membudayakan norma keluarga kecil, Bahagia, dan Sejahtera dalam program keluarga berencana (KB). Sedangkan kebijakan penurunan mortalitas penduduk dilaksanakan melalui upaya penurunan kematian ibu dan anak.

2. Peningkatan Kualitas Penduduk

Peningkatan kualitas penduduk merujuk pada variabel yang terdapat dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang Dimana IPM sendiri terbentuk dari 3 dimensi dasar yaitu, Pendidikan, Kesehatan, dan Standar Hidup Layak.

Secara umum pada dasarnya kebijakan peningkatan kualitas penduduk di bidang kesehatan dilaksanakan melalui :

- a. Peningkatan kualitas hidup, terutama bagi ibu dan anak dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan peran pemerintah daerah dan swasta serta memberdayakan keluarga dan masyarakat
- b. Peningkatan status gizi dengan cara melakukan penguatan perbaikan gizi masyarakat dan meningkatkan ketersediaan serta aksesibilitas pangan penduduk
- c. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat

Arah kebijakan peningkatan kualitas penduduk di bidang pendidikan dapat dilaksanakan melalui beberapa program antara lain sebagai berikut :

- a. Peningkatan akses penduduk agar mendapatkan pendidikan yang baik dan memenuhi cakupan pendidikan 9 dan 12 tahun
- b. Peningkatan kompetensi penduduk melalui pendidikan formal, pendidikan nonformal, maupaun pendidikan informal untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dalam pembangunan nasional salah satunya untuk memenuhi kebutuhan kompetensi di lapangan pekerjaan.
- c. Pengurangan kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin dengan meningkatkan akses bagi Perempuan untuk mendapatkan dan memperoleh pendidikan agar dapat meningkatkan angka Indeks Pembangunan Gender

Arah kebijakan peningkatan kualitas penduduk untuk meningkatkan standar hidup layak dapat dilaksanakan melalui beberapa kegiatan antara lain :

- a. Peningkatan status ekonomi penduduk dengan cara memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran
- b. Pengurangan kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan
- c. Perlindungan penduduk rentan melalui skema perlindungan dan jaminan sosial komprehensif

3. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk dapat dilakukan dengan beberapa arah kebijakan mobilitas penduduk antara lain :

- a. Pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan
- b. Pengarahan persebaran penduduk sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah dengan membangun sistem informasi ketenagakerjaan
- c. Pencegahan munculnya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perpindahan paksa agar dapat mencegah adanya pemukiman liar maupun pemukiman kumuh.
- d. Pemberian perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri secara maksimal.

4. Pembangunan Keluarga Berkualitas

Beberapa arah kebijakan pembangunan keluarga berkualitas dapat dilaksanakan dengan beberapa kebijakan antara lain :

- a. Penguatan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja baik fisik maupun mental
- b. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pemenuhan gizi keluarga bagi keluarga
- c. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pola asuh serta tumbuh kembang anak dan remaja bagi keluarga
- d. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam melakukan relasi antar anggota keluarga dan antar generasi
- e. Penguatan perencanaan kehidupan masa lanjut usia bagi keluarga
- f. Pendampingan penduduk lanjut usia melalui komunitas dan keluarga.

5. Penataan Data dan Informasi kependudukan serta Administrasi Kependudukan

Dalam pilar kelima ini, tujuan utamanya adalah agar terwujudnya sistem data kependudukan Tunggal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk memperkuat ketetapan sasaran pembangunan kependudukan. Beberapa arah kebijakan yang dapat dilaksanakan antara lain :

- a. Penataan dan pengelolaan database kependudukan
- b. Penataan dan penerbitan dokumen kependudukan
- c. Penguatan data dan informasi kependudukan di tingkat desa
- d. pengembangan data terpadu sistem informasi kependudukan dan keluarga berbasis teknologi informasi

KESIMPULAN

Untuk meningkatkan pelaksanaan program kegiatan dibidang kependudukan maka diperlukan suatu dokumen yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan program-program kependudukan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Desain Pembangunan Kependudukan menjelaskan bahwa Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) terdiri dari 5 pilar Pembangunan di bidang kependudukan antara lain Pengelolaan Kuantitas Penduduk, Peningkatan Kualitas Penduduk, Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk, Pembangunan Keluarga Berkualitas, Penataan Data dan Informasi Kependudukan Serta Administrasi kependudukan. Kelima pilar ini diharapkan dapat menjadi dokumen yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program-program kependudukan baik secara nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fassa, A. I. (2018). Aplikasi Self Organizing Maps dan Webgis dengan menggunakan R dan QGIS untuk Analisis Kependudukan 100 Negara di Dunia.
- Alfassa, A. I. (2022). Statistika Kependudukan Untuk Rencana Kebijakan Kependudukan Daerah. *DEMOS: Journal of Demography, Ethnography and Social Transformation*, 2(2), 76-85.
- Imani, N., Alfassa, A. I., & Yolanda, A. M. (2023). ANALISIS CLUSTER TERHADAP INDIKATOR DATA SOSIAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR MENGGUNAKAN METODE SELF ORGANIZING MAP (SOM). *Jurnal Gaussian*, 11 (3), 458-467.
- Alfassa, A. I. (2023). Bayesian Statistics for Study Population Statistics and Demography. *Journal of Statistical Methods and Data Science*, 1(1), 17-24.
- Al Fassa, A. I., & Kesumawati, A. (2020). Segmentation of Karhutla Hotspot Point of Indragiri Hilir Regency 2015 and 2016 using Self Organizing Maps (Soms). In *Proceedings Of the International Conference on Mathematics and Islam (ICMIs 2018). UIN Mataram Indonesia and ADMAPEA (Asosiasi dosen matematika dan pendidikan/Tadris Matematika), Mataram, Indonesia* (pp. 336-341).
- Kashi, R. Y., Sulhaerati, S., Maulina, G., Septian, Y. D., Alfassa, A. I., & Widodo, E. (2018). Analisis Cluster Terhadap Data Imunisasi Polio di Indonesia Tahun 2016 Menggunakan Metode Self Organizing Maps (SOMS).
- Alfassa, A. I., M. M. Darwin. (2020). *Melihat Ketenagakerjaan dan Perbandingan Penduduk Bekerja di Indonesia Berdasarkan Gender. Prosiding Seminar*

Nasional Geografi III Peran Keilmuan Geografi Dalam Angenda Pembangunan Nasional 2019-2024. Program Studi Pascasarjana Geografi, Fakultas Geografi. Universitas Gadjah Mada.

Alfassa, A. I. (2020). Kajian Karakteristik Wilayah Dengan Self Organizing Maps Untuk Menentukan Tujuan Lokasi Transmigrasi (Universitas Gadjah Mada).

Alfassa, A. I. (2023, December). Terminologi Studi Kependudukan Terhadap Pembelajaran Geografi. In Prosiding Seminar Nasional Geografi (Vol. 1, No. 1, pp. 27-33).

Alfassa, A. I., Sudrajat, S., & Marwasta, D. (2023). Development of official statistics models for analysis of population sectoral data in Indragiri Hilir Regency. In E3S Web of Conferences (Vol. 468, p. 06007). EDP Sciences.

Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk BKKBN. Panduan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar. Kantor BKKBN Pusat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 Ayat 2. Tentang Warga Negara dan Penduduk. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 Tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan